

PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP BIAYA UTANG

Gita Fitri Anggini¹, Samin², Satria Yudhia Wijaya³

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta¹²³

gitafitrianggini@gmail.com¹, samin@upnvj.ac.id²,
satria.wijaya@upnvj.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Corporate Governance* terhadap biaya utang. Sampel penelitian adalah perusahaan sub sektor semen, logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling method*. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran Dewan Komisaris, Proporsi Komisaris Independen dan Keahlian Keuangan Komite Audit berpengaruh terhadap Biaya Utang. Sedangkan variabel independen selain itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap biaya utang. Secara simultan, seluruh variabel independen yang mewakili *Corporate Governance* mempengaruhi biaya utang

Kata kunci: Biaya Utang, Dewan Komisaris, Komite Audit

Abstract

This research is using quantitative study aimed to see whether there are influence of corporate governance to cost of debt. This research using sample from subsector of cement, metal and allied products companies listed in IDX among 2014-2018. Data collected with purposive sampling method. The method analysis is using Multiple Linear Regression. The result of this research showed that Board of Commissioner's Size, Independent Commisioners, and Financial Expertise of Audit Committee have significant effect to cost of debt. The rest of independent variables haven't significant effect to cost of debt. Simultaneously, all independent vaiables as represent of Corporate Governance have significant effect to cost of debt

Keywords: Cost of Debt, Board of Commissioner, Audit Committee

PENDAHULUAN

Seluruh organisasi dibentuk untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan nilai kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi *stakeholder*. Laba adalah tujuan perusahaan demi menyejahterakan *stakeholder* terutama pemegang saham. Instrumen pendanaan melalui utang dapat menjadi alternatif pendanaan dalam usaha perusahaan menyejahterakan *stakeholder*. Manfaat utang bagi perusahaan juga dapat menjadi faktor meningkatkan nilai perusahaan (Ahsani, 2018 hlm. 2).

Utang akan sangat bermanfaat apabila dapat dimanfaatkan dan diatur dengan baik. Kasusnya dapat dilihat langsung dari manfaat utang bagi

Indonesia. Utang pemerintah Indonesia tercatat bertambah hingga Rp 1.329,9 triliun sepanjang tahun 2015 sampai 2017. Penggunaan utang ini didistribusikan untuk masyarakat sebagai *stakeholder* negara Indonesia.

Utang bagaikan pisau yang memiliki dua sisi yang berlawanan, dapat bermanfaat namun dapat juga menyebabkan pihak yang terlibat merugi hingga terpaksa bangkrut. Kasus global mengenai utang terjadi pada negara-negara berkembang yang mampu mencetak predikat tercepat dan terbesar selama 50 tahun terakhir.

Utang yang menimbulkan biaya utang menjadi salah satu komponen pengurang laba. Apabila tingkat utang suatu perusahaan terlalu tinggi dan tidak ditangani dengan pengelolaan yang tepat, hal ini dapat menimbulkan resiko. Jika sebuah perusahaan dinilai memiliki resiko yang tinggi, kreditur akan menetapkan bunga pinjaman yang tinggi. Hal ini dilakukan kreditur guna mengantisipasi resiko perusahaan apabila tak mampu membayar utangnya atau dikenal dengan istilah *default risk* (Wardani & Rumahorbo, 2018 hlm. 180).

Utang yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu iklim bisnis. Sebagaimana yang terjadi pada kasus utang besar SNP Finance yang menyebabkan kerugian bagi 14 bank dan berujung pada tindak pidana. Kasus SNP Finance didasarkan atas manipulasi laporan keuangan dengan menggelembungkan piutang agar dapat mengajukan pinjaman. Perusahaan biaya ini juga dinyatakan gagal bayar bunga surat utang jangka menengah yang jatuh tempo 9 Mei 2018 senilai Rp 5,25 miliar. Serta bunga MTN III seri B yang jatuh tempo 14 Mei 2018 senilai Rp 1,5 miliar. Adapun nilai pokok utang tersebut mencapai Rp 250 miliar. Adapun total utang bunga SNP Finance mencapai Rp 9,75 miliar (katadata.com, 27 Desember 2018).

Tata kelola yang baik dipercaya mampu menjadi mekanisme ampuh menghindari resiko dan kerugian bisnis. Sebaliknya, tata kelola yang buruk dapat menyebabkan perusahaan terancam merugi. Seperti kasus yang terjadi pada Krakatau Steel yang terhitung sudah tujuh tahun selalu membukukan rugi dan menumpuk utang. Adapun besar utang perusahaan baja pelat merah ini yaitu berupa utang jangka panjang US\$ 899,43 juta dan utang jangka pendek mencapai US\$ 1,59 miliar. Tercatat juga beban keuangan KRAS di tahun 2018 sebesar US\$ 112,33 juta tumbuh dua kali lipat dibandingkan dengan 2011. Buruknya keuangan perusahaan ini makin ditandai dengan jumlah beban utang yang lebih besar dari kemampuan bayarnya (CNBC Indonesia, 2019).

Dari banyaknya kasus kerugian telah menimpa perusahaan-perusahaan publik di Indonesia menjadi sebuah hal yang wajar dikarenakan standar dan pelaksanaan tata kelola negara Indonesia masih dalam tingkat yang rendah. Hal ini dapat dibuktikan melalui laporan pemeringkatan yang dikeluarkan oleh ASEAN *Corporate Governance Scorecard* yang memberikan nilai tata kelola Indonesia yang masih pada peringkat terbawah dari negara-negara yang berpartisipasi dalam ajang ini. Masih rendahnya peringkat tata kelola Indonesia ini menjadi pertanda bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah besar atas aspek *corporate governance* khususnya perusahaan publik. Hal ini bertolak belakang dengan kekuatan ekonomi Indonesia yang masuk 12 besar dunia dan yang terbesar di Asia Tenggara. Perlu ada dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan dan kualitas sistem tata kelola terus

meningkat dan kemanfaatannya bagi rakyat juga semakin besar (www.liputan6.com, 10 Desember 2018).

Kebijakan mengenai *Corporate governance* bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan oportunistik yang mungkin terjadi. Maka dari itu mekanisme pengawasan yang memadai dapat mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Prinsip tata kelola perusahaan pada umumnya telah mengarahkan perusahaan untuk menciptakan manfaat untuk *stakeholder* dan menghargai setiap haknya. Dapat dilihat dari prinsip umum *corporate governance* yang terdiri dari (1) Transparansi, (2) Akuntabilitas, (3) Responsibilitas, (3) Independensi, dan (5) Keadilan (*Fairness*).

Biaya utang yang menjadi salah satu komponen pengurang laba juga harus dikelola dengan baik demi mencapai kesejahteraan pemegang saham yang sebesar-besarnya. Anderson et al. (2004) mendapatkan bukti mengenai fungsi pengawasan pada *Board* yang diukur dengan ukuran Dewan Komisaris, proporsi Komisaris Independen serta Keahlian Dewan Komisaris dapat mempengaruhi proses akuntansi keuangan perusahaan dan berdampak pada perusahaan menikmati biaya bunga yang lebih rendah. Piot & Piera (2009) juga menemukan bukti mengenai kreditor yang turut mempertimbangkan ukuran Dewan Komisaris serta keahlian keuangan Dewan Komisaris yang lebih besar sebagai interpretasi pengawasan yang lebih baik. Namun, kontras Nugroho & Meiranto, (2014) berpendapat bahwa Komisaris Independen mempengaruhi biaya utang secara positif karena efektivitas Komisaris independen yang mampu meminimalisir asimetri informasi dan menggambarkan keadaan perusahaan secara sebenarnya.

Lorca et al (2011) menemukan hasil bahwa variabel Dewan Komisaris melalui ukuran, kepemilikan saham dan frekuensi rapat merupakan atribut yang diperhatikan Kreditur dalam pertimbangan memberi pinjaman dan menentukan besaran imbalan yang mereka harapkan. Namun kontras dengan pendapat sebelumnya, Sarasmita et al (2018) yang berpendapat bahwa Dewan Komisaris yang melaksanakan rapat secara intensif menandakan bahwa sebenarnya tengah mengalami krisis sehingga membutuhkan komunikasi intens dari Komisaris. Pendapat ini juga didukung oleh penelitian sebelumnya Juniarti & Sentosa (2009) serta Yunita (2012) yang berpendapat bahwa selama adanya mayoritas yang memegang kendali atas perusahaan, Dewan Komisaris tidak mampu melaksanakan fungsi pengelolaan perusahaan secara optimal karena pengaruh dan tekanan yang mungkin diberikan para pengendali dan dikatakan hanya sebagai formalitas penerapan GCG yang baik yang diatur regulator.

Nugroho & Meiranto (2014) menemukan bukti bahwa pertemuan Komite Audit yang rutin dilaksanakan mampu mengurangi masalah pelaporan keuangan serta meningkatkan kinerja perusahaan, namun sisi ini tidak memiliki dampak pada kreditor yang memiliki persepsi tersendiri dalam memberikan keputusan pendanaan. Hal yang berbeda ditunjukkan Anderson et al. (2004) bahwa kreditor juga mempertimbangkan fungsi pengawasan Komite Audit dalam membuat kebijakan peminjaman. Peran Komite Audit ditandai dengan ukuran, proporsi independen, frekuensi rapat dan keahlian

keuangan Komite Audit. Rahmawati (2015) yang juga menemukan bukti adanya tanda penurunan biaya utang akibat kualitas Komite Audit yang baik.

Fokus penelitian yaitu untuk meneliti setiap faktor yang dapat mempengaruhi biaya utang. Berdasarkan hasil diskusi yang telah disampaikan terdapat perbedaan hasil penelitian atas variabel-variabel *corporate governance* yang diproksikan dengan Ukuran, Independensi, Frekuensi Rapat dan Keahlian Keuangan Dewan Komisari dan Komite Audit terhadap biaya utang.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan hubungan antara pihak pemilik kepada agen untuk melaksanakan tugas tertentu termasuk pengambilan keputusan dengan menggunakan atas nama pemilik dalam suatu perusahaan. Hubungan ini meliputi pendelegasian sebagian kewenangan pengambilan keputusan kepada agen (Sochib, 2016 hlm.20). Agen yang terdiri dari sekelompok manusia memiliki sifat alamiah yaitu ingin menguntungkan diri sendiri (oportunis) dan rasionalitas untuk mementingkan dirinya terlebih dahulu. Masalah keagenan timbul dan berjalan mengikuti hubungan keagenan. Dalam hal pengambilan keputusan atas kebijakan perusahaan seperti utang hingga investasi, dapat juga tersandung dengan masalah agensi. Agen yang diperankan oleh manajer memiliki kemampuan yang lebih banyak karena keterlibatannya secara langsung dalam bisnis perusahaan. Atas hal ini, agen memiliki tanggung jawab kepada pemilik untuk memberitakan kondisi perusahaan secara jujur. Informasi tersebut dapat berupa pertimbangan-pertimbangan dan alasan diambilnya suatu kebijakan atau keputusan. Namun apabila agen tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana mestinya, maka hal tersebut dinamakan masalah agensi, dan keterjadiannya harus diminimalisir karena dapat merugikan pemilik.

B. Biaya Utang

Biaya utang atau *cost of debt* didefinisikan sebagai besar bunga yang harus perusahaan bayarkan saat memilih alternatif berutang (Saputra & Faizal, 2016 hlm 850). Biaya utang merupakan tingkat suku bunga yang disyaratkan oleh institusi keuangan dan pihak lainnya yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga (*interest rate*) yang mesti dibayar (Binus University, 2015). Biaya utang dapat disimpulkan sebagai beban yang timbul dari pinjaman perusahaan yang berasal dari utang dari bank. Semakin tinggi utang perusahaan menyebabkan biaya utang meningkat dan mempengaruhi kesejahteraan para pemegang saham.

C. Corporate Governance

Corporate Governance yaitu seperangkat aturan yang mampu dijadikan sebagai acuan dan jaminan bahwa kegiatan perusahaan adalah mengenai pemenuhan kepentingan para *stakeholder* perusahaan (Wardani & Rumahorbo, 2018 hlm. 182). *Corporate Governance* merupakan mekanisme yang dirancang dan dibangun untuk mengatur hubungan antar *stakeholder* perusahaan. Apabila sebuah perusahaan mampu memperhatikan setiap

kepentingan *stakeholder* perusahaan maka perusahaan tersebut masuk sebagai perusahaan dengan tata kelola yang baik. Begitu juga tujuan perusahaan mampu diraih karena dukungan tata kelola perusahaan yang mumpuni.

1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris berwenang terhadap fungsi pengawasan setiap tindakan manajemen puncak dalam sebuah perusahaan (Prastiti, 2013 hlm. 28). Ukuran Dewan Komisaris dapat memainkan peran yang signifikan terhadap kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian terhadap manajer (Anderson et al., 2004 hlm. 321). Cakupan permasalahan perusahaan yang luas akan dapat dibantu dengan jumlah Dewan Komisaris yang memadai sehingga mampu mengawasi seluruh titik permasalahan yang terjadi di perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan dianggap memiliki resiko yang rendah sehingga mampu menjadi bahan pertimbangan bagi para kreditur untuk menentukan tingkat pengembalian yang rendah.

H1: Terdapat hubungan negatif antara ukuran Dewan Komisaris dengan Biaya Utang

2. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Rapat menjadi sarana Dewan Komisaris dalam memberikan arahan, nasihat, serta pendapat mengenai strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Dewan Direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Tiena (2017) dan Lorca et al., (2011) menemukan bukti bahwa apabila Dewan Komisaris memiliki frekuensi rapat yang tinggi akan berdampak pada kemampuan peningkatan efektivitas tugas Dewan Komisaris dan berdampak pada perusahaan yang menikmati biaya utang yang lebih rendah. Kreditur dianggap memperhatikan efektivitas Dewan Komisaria melalui pertemuan Dewan Komisaris. Dengan rapat yang semakin sering dilaksanakan, maka peluang Dewan Komisaris untuk memberikan arahan dan memberikan tanggapan yang responsif terhadap permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan akan semakin tinggi.

H2: Terdapat hubungan negatif antara frekuensi rapat Dewan Komisaris dengan Biaya Utang

3. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen dalam sebuah Dewan Komisaris dianggap dapat meningkatkan kredibilitas arahan yang diberikan Dewan Komisaris kepada Direksi. Hal ini disebabkan Komisaris Independen yang terbebas dari berbagai kepentingan internal perusahaan (Prastiti, 2013). Perusahaan dengan ukuran Dewan Komisaris Independen yang lebih besar akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan menjadi lebih baik (Rahmawati, 2015). Komisaris Independen diharapkan mampu mempersempit peluang terjadinya pelaporan keuangan yang dicurangi oleh manajemen. Aspek independensi dari Komisaris Independen juga mampu menjadi penyeimbang arahan Dewan. H3: Terdapat hubungan negatif antara Komisaris Independen dengan Biaya Utang

4. Keahlian Keuangan Dewan Komisaris

Fungsi pengawasan yang dimiliki Dewan Komisaris harus didukung dengan penguasaan kompetensi atas bisnis yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mampu mencegah peluang terjadinya kerugian perusahaan dan kebangkrutan (Deviacita, 2015). Apabila sebuah perusahaan mampu membawa dirinya untuk menghindari kerugian dan resiko kebangkrutan, maka kreditur akan mempertimbangkan hal tersebut sebagai faktor untuk meminimalkan tingkat pengembalian yang mereka harapkan. Hal ini dapat digunakan sebagai proksi bagi kreditur bahwa perusahaan diawasi oleh sebuah Dewan Komisaris yang mampu memahami keuangan perusahaan secara optimal. Berdasarkan penjabaran dalam uraian di atas dapat diajukan bahwa hipotesis yang digunakan yaitu:

H4: Terdapat hubungan negatif antara Keahlian Keuangan Dewan Komisaris dengan Biaya Utang

5. Ukuran Komite Audit

Komite Audit berperan sebagai satuan yang membantu tugas Dewan Komisaris dalam fungsi pengawasan terhadap tata kelola perusahaan. Pembentukan Komite Audit diwajibkan dan telah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015. Keberadaan Komite Audit yang handal dapat digunakan oleh pihak luar perusahaan sebagai indikator kualitas audit perusahaan yang tinggi (Piot & Piera, 2009).

H5: Terdapat hubungan negatif antara Ukuran Komite Audit dengan Biaya Utang

6. Frekuensi Rapat Komite Audit

Frekuensi rapat Komite Audit dimaksudkan sebagai rapat yang dilaksanakan oleh Komite Audit dalam penanganan dan pengawasan mengenai berbagai hal pelaporan keuangan perusahaan yang disusun oleh manajemen selama satu tahun periode. Asimetri informasi yang dapat dikurangi karena selalu ada komunikasi dan koordinasi antara Komite Audit sebagai pengawas dengan Manajemen sebagai pengelola proses akuntansi dan keuangan perusahaan. Efektivitas Komite Audit diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan reputasi perusahaan (Adam et al., 2015). Penelitian dari Adam et al (2015) menemukan bukti mengenai efektivitas Komite Audit dapat ditingkatkan perusahaan maka hal ini dapat memberikan pengaruh pada biaya utang yang menjadi lebih kecil.

H6: Terdapat hubungan negatif antara Frekuensi rapat Komite Audit dengan Biaya Utang

7. Proporsi Komite Audit Independen

Efektivitas fungsi pengawasan pada manajemen mampu terwujud atas Komite Audit yang handal dan bebas dari berbagai benturan kepentingan. Dengan Komite Audit yang terdiri dari berbagai pihak independen akan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan (Prastiti, 2013). Peraturan OJK No.55 tahun 2015 telah mengatur para perusahaan publik agar memiliki Komite Audit yang beranggotakan pihak yang independen. Penelitian sebelumnya yang telah menemukan pentingnya proposi Komite Audit yang Independen mampu membuat perusahaan menikmati rendahnya

biaya yaitu Anderson et al., (2004). Hipotesis yang dapat diajukan atas diskusi yang telah dilakukan diatas yaitu:

H7: Terdapat hubungan negatif antara Proporsi Komite Audit Independen dengan Biaya Utang

8. Keahlian Keuangan Komite Audit

Pengawasan yang baik dapat berjalan dengan efektif apabila satuan pengawas memiliki kemampuan yang memadai agar dapat memahami bidang permasalahan yang terjadi. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan OJK No.55 Tahun 2015 yang mengharuskan perusahaan agar membuat satuan Komite Audit beranggotakan minimal satu orang yang memiliki kompetensi dalam bidang akuntansi. Pentingnya keahlian keuangan Komite Audit terhadap peningkatan kualitas tata kelola yang berdampak pada penurunan biaya utang telah dibuktikan oleh Anderson et al., (2004) yang berpendapat bahwa pengawasan yang efektif berpeluang lebih besar dapat terwujud apabila didukung dengan kemampuan dan kompetensi yang baik oleh satuan pengawas di atasnya. Atas diskusi yang telah dilakukan di atas, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H8: Terdapat hubungan negatif antara Keahlian Keuangan Komite Audit dengan Biaya Utang

H9: Terdapat hubungan negatif antara *Corporate Governance* dengan Biaya Utang

METODE PENELITIAN

A. Definisi Operasional dan Pengukuran

1. Biaya Utang (Y)

Biaya utang merupakan besar bunga yang harus perusahaan bayarkan saat memilih alternatif berutang (Saputra & Faizal, 2016 hlm. 850). Pengukuran biaya utang dapat dihitung dengan membagi beban bunga dengan total utang berbunga (Pinangkaan, 2012 hlm. 105).

$$Biaya\ Utang = \frac{Beban\ Bunga}{Total\ Utang\ Berbunga}$$

2. Ukuran Dewan Komisaris (X1)

Ukuran Dewan Komisaris didapatkan dengan menghitung jumlah anggota Dewan Komisaris pada suatu perusahaan (Thesarani, 2016 hlm. 30).

$$Ukuran\ DK = \sum Anggota\ Dewan\ Komisaris$$

3. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (X2)

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris adalah jumlah seluruh pertemuan / rapat yang diadakan oleh Dewan Komisaris per tahun pengamatan (Hadi, 2015 hlm. 59).

$$Frekuensi\ Rapat\ Dewan\ Komisaris = \sum Rapat\ Dewan\ Komisaris$$

4. Proporsi Komisaris Independen (X3)

Proporsi Komisaris Independen adalah jumlah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki afiliasi dengan perusahaan (Rahmawati, 2015).

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

5. Keahlian Keuangan Dewan Komisaris (X4)

Keahlian Keuangan Dewan Komisaris adalah proporsi jumlah Dewan Komisaris dengan pengalaman kerja atau pendidikan ekonomi, keuangan dan akuntansi dengan total keseluruhan Dewan Komisaris (Prastiti, 2013).

$$\text{Keahlian Keuangan DK} = \frac{\sum \text{Ahli Keuangan di DK}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$$

6. Ukuran Komite Audit (X5)

Ukuran Komite Audit adalah banyak anggota Komite Audit dalam sebuah perusahaan (Thesarani, 2016).

$$\text{Ukuran KA} = \sum \text{Anggota Komite Audit}$$

7. Frekuensi Rapat Komite Audit (X6)

Frekuensi rapat Komite Audit merupakan jumlah berapa banyaknya pertemuan diadakan oleh Komite Audit dalam satu tahun (Nugroho & Meiranto, 2014 hlm. 5).

$$\text{Frekuensi Rapat Komite Audit} = \sum \text{Rapat Komite Audit}$$

8. Proporsi Komite Audit Independen (X7)

Proporsi Komite Audit Independen adalah jumlah anggota independent yang dimiliki perusahaan (Prastiti, 2013).

$$\text{Proporsi Komite Audit Independen} = \frac{\sum \text{Komite Audit Independen}}{\sum \text{Komite Audit}}$$

9. Keahlian Keuangan Komite Audit (X8)

Keahlian Keuangan Komite Audit adalah berupa anggota yang memiliki latarbelakang pendidikan atau pengalaman bidang ekonomi, keuangan atau akuntansi (Deviacita, 2015 hlm. 5).

$$\text{Keahlian Keuangan KA} = \frac{\sum \text{Ahli Keuangan di KA}}{\sum \text{Komite Audit}}$$

B. Populasi dan Sampel

Kumpulan obyek atau subyek dengan kuantitas dan memiliki ciri tertentu yang terkumpul dalam sebuah wilayah generalisasi dan ditetapkan untuk dilakukan proses penelitian agar dapat memperoleh kesimpulan (Sugiyono, 2014 hlm. 148). Adapun populasi yang telah ditetapkan untuk diteliti yaitu perusahaan publik sub sektor semen, logam dan sejenisnya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Metode purposive sampling mendasari peneliti untuk menggunakan sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian dan pertimbangan tertentu yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014 hlm. 156). Berikut ini merupakan kriteria yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Perusahaan sub sektor semen, logam dan sejenisnya yang terdaftar di BEI pada tahun 2014-2018.

- 2) Perusahaan dengan penyajian laporan keuangan yang lengkap meliputi laporan tahunan (*Annual Report*) dan menyajikan data-data yang diperlukan untuk pengukuran variabel penelitian.
- 3) Perusahaan yang memiliki utang berbunga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan-perusahaan yang fokus dalam produksi logam serta semen menjadi salah satu jenis industri dengan peranan yang sangat penting bagi kemajuan Indonesia. Penggolongan sektor ini dalam Bursa Efek Indonesia yaitu bagian dari *basic industry*. Sampel penelitian sebanyak 75 sampel berasal dari 15 perusahaan yang terdaftar sebagai sub sektor semen serta logam dan sejenisnya.

Tabel 1 Daftar Perusahaan Sampel

No	Kode	Nama Perusahaan
1	ALKA	Alaska Industrindo Tbk
2	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
3	BAJA	Saranacentral Bajatama Tbk
4	CTBN	Citra Turbindo Tbk
5	GDST	Gunawan Dianjaya Steel Tbk
6	INAI	Indal Alumunium Industry Tbk
7	KRAS	Krakatau Steel (Persero) Tbk
8	LMSH	Lionmesh Prima Tbk
9	NIKL	Pelat Timah Nusantara Tbk
10	TBMS	Tembaga Mulia Semanan Tbk
11	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
12	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk
13	SMCB	Holcim Indonesia Tbk
14	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk
15	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk

Sumber: Data Olah 2020

B. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan prasyarat statistik yang bertujuan untuk menilai sebaran data variabel dengan keputusan data berdistribusi dengan baik atau tidak.

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas dengan *1-Sample Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		75
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	0.000000
	Std. Deviation	0.02869937
Most Extreme Differences	Absolute	0.071
	Positive	0.071
	Negative	-0.055
Test Statistic		0.071

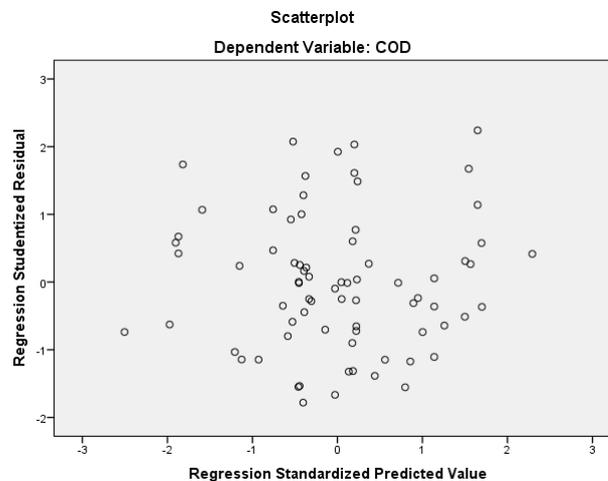
Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan *1-Sampled Kolmogorov-Smirnov* pada tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai *Asymp. Sig (2-tailed)* adalah sebesar 0,200. Nilai 0,200 dinyatakan lebih tinggi dari 0,05 maka dinyatakan memenuhi kriteria bahwa nilai residu berdistribusi secara normal. Berdasarkan hasil ini juga, sampel dinyatakan memenuhi uji asumsi klasik normalitas.

2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk mencari tahu apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Tabel *coefficients* menunjukkan bahwa nilai VIF dalam kolom *Collinearity Statistics* setiap variabel independen bernilai lebih kecil 10. Selain itu kriteria yaitu mengenai nilai kesalahan yang diterima dalam kolom *tolerance*, yang juga menunjukkan nilai yang lebih besar dari 0,10. Berdasarkan hal ini dapat dinyatakan bahwa model regresi dalam penelitian ini dikatakan baik karena terbebas dari masalah multikolinieritas.

3. Uji Heterokedastistas

Uji heteroskedastistas dilakukan untuk mencari tahu apakah terdapat perbedaan varians sebuah nilai residual antar satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Grafik *scatterplot* penelitian menunjukkan titik-titik dengan pola menyebar dan acak. Atas pertimbangan tersebut maka tidak terjadi gejala heterokedastistas pada model regresi yang digunakan.



Sumber: Data Olah, 2020

Gambar 1 Grafik *Scatterplot*

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dimaksudkan untuk menilai apakah dalam model regresi yang diajukan terjadi korelasi antar setiap nilai residual pada suatu periode (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Metode yang digunakan untuk menguji masalah autokorelasi yaitu dengan *Durbin's Two Step Method*.

Tabel 3 Uji Autokorelasi *Durbin-Watson Step 1*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.581 ^a	.338	.258	.71925	1.384

a. Predictors: (Constant), LnX8, LnX7, LnX6, LnX3, LnX4, LnX2, LnX1, LnX5
b. Dependent Variable: LnY

Sumber: Data Olah

Tabel 4 Uji Autokorelasi *Durbin-Watson Step 2*

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.521 ^a	.271	.181	.68587	1.966

a. Predictors: (Constant), LnX8@1, LnX6@1, LnX7@1, LnX3@1, LnX2@1, LnX4@1, LnX1@1, LnX5@1
b. Dependent Variable: LnY@1

Sumber: Data olah

Nilai 1.966 dinyatakan lebih besar dari nilai dU dalam tabel *Durbin Watsons* yang menunjukkan nilai 1.8679, serta tidak lebih besar dari 2.1321. Apabila dijabarkan didapatkan bentuk seperti berikut $1.8679 < 1.966 < 2.1321$. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi dan dinyatakan telah memenuhi uji asumsi klasik autokorelasi.

C. Uji Hipotesis

1. Uji F

Tes simultan dengan uji F bertujuan untuk mencari tahu apakah seluruh variabel independen penelitian dalam model regresi mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 6 Hasil Uji F (Simultan)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	0.019	8	0.002	2.601	.016 ^b
1	Residual	0.061	66	0.001		
	Total	0.080	74			

a. Dependent Variable: COD

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan distribusi tabel F dengan probabilitas 5%, F tabel = (8, 66) didapatkan nilai F tabel sebesar 2,080. Sehingga didapatkan nilai $2,080 < 2,601$ yang artinya F hitung lebih besar dari F tabel dan dapat disimpulkan bahwa variabel *DK-SIZE*, *DK-FREQ*, *DK-INDEP*, *DK-EXPERT*, *KA-SIZE*, *KA-FREQ*, *KA-*

INDEP dan *KA-EXPERT* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *COD*.

2. Uji R²

Koefisien determinasi pada dasarnya dilakukan untuk mencari tahu besaran proporsi varians dari variabel dependen yang mampu dapat digambarkan oleh prediksi asal variabel independen.

Tabel 7 Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.490 ^a	0.240	0.148	0.03040

a. Predictors: (Constant), *KA-EXPERT*, *KA-FREQ*, *KA-INDEP*, *DK-INDEP*, *DK-EXPERT*, *DK-SIZE*, *DK-FREQ*, *KA-SIZE*
b. Dependent Variable: *COD*

Sumber: Data olah

Nilai yang didapatkan dari perhitungan *R Square* adalah adalah 24% atau 0,240 dengan artian variabel independen yang digunakan dalam penelitian mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 24%. Sedangkan variabel independen lain yang tidak masuk ke dalam model regresi penelitian mampu menjelaskan sisanya yaitu sebesar 76% terhadap variabel dependennya.

3. Uji T

Uji parsial dilakukan untuk mencari tahu berapa jauh kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel dependen secara individual serta menentukan apakah dugaan penelitian yang telah diajukan sebelumnya diterima atau ditolak.

Tabel 8 Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-0.035	0.056		-0.627	0.533
	<i>DK-SIZE</i>	0.006	0.003	0.295	2.299	0.025
	<i>DK-FREQ</i>	-6.031E-05	0.000	-0.019	-0.151	0.881
	<i>DK-INDEP</i>	0.084	0.039	0.252	2.145	0.036
	<i>DK-EXPERT</i>	0.031	0.016	0.240	1.958	0.054
	<i>KA-SIZE</i>	0.005	0.013	0.054	0.402	0.689
	<i>KA-FREQ</i>	0.000	0.001	-0.057	-0.428	0.670
	<i>KA-INDEP</i>	-0.029	0.031	-0.108	-0.951	0.345
	<i>KA-EXPERT</i>	0.040	0.018	0.293	2.293	0.025

a. Dependent Variable: *COD*

Sumber: Data olah, 2020

Berdasarkan Tabel di atas dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka tiap variabel independen dan dependen dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Variabel Ukuran Dewan Komisaris (*DK-SIZE*)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi Ukuran Dewan Komisaris sebesar 0,025 yang menunjukkan nilai lebih kecil dari angka 0,05. Dengan dasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat diambil keputusan bahwa Ukuran Dewan Komisaris **berpengaruh secara signifikan** terhadap Biaya Utang.

b) Variabel Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (*DK-FREQ*)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi Frekuensi Rapat Dewan Komisaris sebesar 0,881 yang artinya menunjukkan nilai lebih besar dari angka 0,05. Dengan dasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Ukuran Dewan Komisaris **tidak berpengaruh secara signifikan** terhadap Biaya Utang.

c) Variabel Proporsi Komisaris Independen (*DK-INDEP*)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai *Sig.* dari Proporsi Komisaris Independen dengan nilai 0,036 menunjukkan nilai lebih kecil dari angka 0,05. Dengan dasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat diputuskan bahwa Proporsi Komisaris Independen **memiliki pengaruh secara signifikan** terhadap Biaya Utang.

d) Variabel Keahlian Keuangan Dewan Komisaris (*DK-EXPERT*)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi Keahlian Keuangan Dewan Komisaris dengan nilai 0,054 menunjukkan nilai lebih besar dari angka 0,05. Dengan dasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan bahwa Keahlian Keuangan Dewan Komisaris **tidak memiliki pengaruh secara signifikan** terhadap Biaya Utang.

e) Variabel Ukuran Komite Audit (*KA-SIZE*)

Hasil pengujian statistik menunjukkan Ukuran Komite Audit memiliki nilai signifikansi pada angka 0,689 menunjukkan nilai lebih tinggi dari angka 0,05. Dengan dasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa Ukuran Komite Audit tidak **berpengaruh secara signifikan** terhadap Biaya Utang.

f) Variabel Frekuensi Rapat Komite Audit (*KA-FREQ*)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikansi Frekuensi Rapat Komite Audit pada angka 0,670 menunjukkan nilai lebih besar dari angka 0,05. Dengan dasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diputuskan adalah Frekuensi Rapat Komite Audit **tidak berpengaruh secara signifikan** terhadap Biaya Utang.

g) Variabel Proporsi Komite Audit Independen (*KA-INDEP*)

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa Proporsi Komite Audit Independen memiliki angka signifikansi sebesar 0,345 menunjukkan nilai lebih besar dari angka 0,05. Dapat diartikan bahwa Proporsi Komite Audit Independen **tidak secara signifikan mempengaruhi** Biaya Utang.

h) Variabel Keahlian Keuangan Komite Audit (*KA-EXPERT*)

Tabel uji statistik *t-test* menunjukkan bahwa nilai signifikansi Keahlian Keuangan Komite Audit sebesar 0,025 menunjukkan nilai lebih kecil dari angka 0,05. Dengan dasar kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, maka ditarik simpulan bahwa Keahlian Keuangan Komite Audit secara **signifikan mempengaruhi** terhadap Biaya Utang.

D. Model Regresi Berganda

Model regresi penelitian adalah sebagai berikut:

$$COD = -0,035 + 0,006DK-SIZE - 0,000DK-FREQ + 0,084DK-INDEP + 0,031DK-EXPERT + 0,005KA-SIZE + 0,000KA-FREQ - 0,029KA-INDEP + 0,040KA-EXPERT + error$$

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Biaya Utang

H1 yang menyatakan bahwa Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap biaya utang, **ditolak**. Berdasarkan hasil penelitian ini, bukti menunjukkan bahwa terdapat dampak **signifikan positif** dari ukuran Dewan Komisaris kepada Biaya Utang. Perusahaan yang memiliki ukuran Dewan Komisaris lebih besar justru dapat menyebabkan beban perusahaan. Hal ini berkaitan dengan teori agensi dimana prinsipal berusaha untuk menghindari konflik kepentingan oleh agen yang menimbulkan biaya agensi dari remunerasi. Dewan Komisaris berukuran besar memiliki kekurangan terutama saat suatu keputusan harus diambil dalam waktu yang singkat. Perbedaan pendapat antar Komisaris dapat memperlambat proses pengambilan keputusan (Sarasmitha et al., 2018 hlm. 98). Fungsi pengawasan berujung pada wewenang Dewan Komisaris dalam memberikan masukan serta saran. Saran dari Dewan Komisaris. Peluang percepatan infrastruktur ditangkap oleh Dewan Komisaris sebagai kesempatan untuk lebih memperlebar bisnisnya dengan berhutang. Selain itu, Dewan Komisaris juga menangkap adanya keuntungan yang dapat perusahaan peroleh atas biaya utang yang makin tinggi yaitu pembayaran pajak perusahaan yang menjadi lebih rendah.

B. Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Biaya Utang

H2 yang menyatakan bahwa Frekuensi Rapat Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya utang, **ditolak**. Penyebabnya adalah rapat internal ataupun gabungan Dewan Komisaris bersama Direksi tidak mampu memastikan bahwa setiap arahan dan masukan dari Dewan Komisaris dalam rapat akan seluruhnya dilaksanakan oleh Direksi. Wewenang dasar Dewan

Komisaris yang bertumpu pada fungsi pengawasan, tidak sebagai pihak penentu keputusan operasional perusahaan yang menjadi tanggung jawab Direksi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sarasmitha et al.,(2018). Sarasmitha berpendapat bahwa intensitas rapat Komisaris yang tinggi mengindikasikan bahwa perusahaan tengah mengalami masalah darurat yang perlu ditangani lebih sering oleh Dewan Komisaris.

C. Pengaruh Proporsi Komisaris Independen terhadap Biaya Utang

H3 yang menyatakan bahwa Proporsi Komisaris Independen berpengaruh terhadap Biaya Utang **ditolak**. Hasil penelitian ini justru menemukan hasil yang sebaliknya yaitu Proporsi Komisaris Independen berdampak **signifikan positif** terhadap Biaya Utang. Keberadaan Komisaris Independen ini menjadi indikator bahwa perusahaan dinilai oleh Kreditor tidak mampu memperhatikan kepentingan kreditor. Hal inilah yang mampu menjadi penyebab biaya utang perusahaan yang meningkat. Komisaris independen tidak dapat menjamin kinerja perusahaan sehingga mempengaruhi Kreditor dalam hal penentuan tingkat pengembalian yang dikenakan ke perusahaan. Hal ini disebabkan adanya anggapan dari kreditor bahwa Direksi masih memiliki pengaruh terhadap Dewan Komisaris yang menyebabkan hasil keputusan Dewan Komisaris belum efektif (Sarasmitha et al., 2018). Komisaris independen dibentuk guna melindungi seluruh *stakeholder* dalam hal pengambilan keputusan yang objektif (Kholmi, et al., 2019). Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Nugroho & Meiranto (2014), Rahmawati (2015).

D. Pengaruh Keahlian Keuangan Dewan Komisaris terhadap Biaya Utang

H4 yang menyatakan bahwa Keahlian Keuangan Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya utang **ditolak**. Keahlian keuangan Dewan Komisaris tidak secara langsung mempengaruhi pengambilan keputusan dan kebijakan yang menjadi wewenang Direksi. Sehingga meskipun perusahaan mempunyai jajaran Dewan Komisaris dengan kompetensi yang tinggi, tetap saja segala keputusan yang diambil berasal dari wewenang Dewan Direksi sebagai pihak pelaksana langsung operasional perusahaan. Dewan Komisaris bertanggungjawab sebatas pada pemberian rekomendasi dan nasihat yang mungkin dijadikan bahan pertimbangan bagi Dewan Direksi. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Anderson et al. (2004) dan Piot & Piera (2009) yang berpendapat bahwa keahlian keuangan Dewan Komisaris dapat menekan biaya utang perusahaan karena pandangan kreditor yang menilai keahlian keuangan Dewan Komisaris sebagai unsur penambah nilai perusahaan.

E. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Biaya Utang

H5 yang menyatakan bahwa ukuran Komite Audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang **ditolak**. Hal ini dikarenakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proses akuntansi perusahaan tidak menjamin perusahaan akan selalu memiliki kinerja yang stabil dan mampu mengatasi resiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Melainkan, proses akuntansi yang sesuai dengan standar yang berlaku tanpa didukung dengan kinerja perusahaan, hanya menjadi sebuah bentuk pengungkapan yang transparansi. Sehingga laporan keuangan yang disusun perusahaan secara sebenar-

benarnya mengungkap informasi bahwa perusahaan sedang mengalami masalah keuangan tertentu atau tidak sedang mengalami masalah sama sekali tidak menjadi alasan yang mampu mempengaruhi pertimbangan kreditur. Hasil penelitian ini sejalan dengan Wardani & Rumahorbo (2018) yang tidak dapat membuktikan adanya pengaruh negatif dari Ukuran Komite Audit terhadap penurunan biaya utang.

F. Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit terhadap Biaya Utang

H6 yang menyatakan bahwa Frekuensi Rapat Komite Audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang **ditolak**. Koordinasi dan komunikasi yang terjadi selama rapat pertemuan Komite Audit didominasi dengan rapat internal yang kebanyakan hanya membahas mengenai pelaksanaan kinerja dan proses akuntansi yang telah terjadi dan memperbaiki masalah yang telah terlanjur terjadi di perusahaan. Rapat-rapat tersebut juga dipenuhi dengan agenda pelaporan kejadian historistik dan peninjauan-peninjauan atas temuan masalah yang disampaikan. Pelaksanaan perbaikan dan segala macam tata kelola tetap menjadi wewenang Dewan Direksi dan manajemen selaku pengurus tata kelola perusahaan. Komite Audit hanya berwenang untuk meninjau dan memberikan rekomendasi atas masalah yang terjadi. Banyaknya pertemuan yang dilakukan Komite Audit justru dapat disebabkan karena masalah di dalam internal perusahaan sehingga diperlukan adanya tindak lanjut atas permasalahan yang terjadi.

G. Pengaruh Proporsi Komite Audit Independen terhadap Biaya Utang

H7 yang menyatakan bahwa Proporsi Komite Audit Independen berpengaruh negatif terhadap Biaya Utang **ditolak**. Hal ini dapat terjadi karena ketentuan mengenai anggota Komite Audit harus berasal dari pihak luar perusahaan publik telah menjadi sebuah syarat dan peraturan yang telah tertuang dalam POJK No.55 tahun 2015 sebagai prasyarat yang harus dipenuhi oleh seluruh perusahaan publik ingin terdaftar di bursa. Komite Audit Independen bisa saja hanya menjadi formalitas belaka tanpa didukung dengan efektivitas yang optimal dari para Komite Audit Independen perusahaan. Karena merupakan sebuah perintah yang harus dipenuhi maka kreditur berpendapat bahwa Komite Audit Independen ini tidak secara serius ditangani perusahaan dan tidak berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dan penurunan resiko perusahaan. Semakin banyak jumlah proporsi Komite Audit Independen tidak dapat menjadi jaminan bahwa kinerja perusahaan akan selalu naik atau perusahaan akan selalu mampu mengatasi resiko yang menyimpannya. Bukti ini sejalan dengan yang penelitian sebelumnya dari Piot & Piera (2009), namun kontras dengan hasil yang didapatkan oleh Anderson et al. (2004).

H. Pengaruh Keahlian Keuangan Komite Audit terhadap Biaya Utang

H8 yang menyatakan bahwa Keahlian Keuangan Komite Audit berpengaruh negatif terhadap biaya utang **ditolak**. Hasil yang didapatkan justru sebaliknya. Keahlian keuangan Komite Audit mempengaruhi biaya utang secara **signifikan positif**. Dengan keahlian yang dimiliki Komite Audit dalam menjalankan tugasnya untuk mengawasi sistemasi dan pelaksanaan pelaporan keuangan perusahaan, mampu berdampak pada minimalisasi asimetri informasi yang terjadi antara manajemen dengan *stakeholder*

perusahaan. Penelitian ini bertentangan dengan teori agensi, dimana Keahlian Keuangan Komite Audit yang berfungsi sebagai syarat pengawasan internal yang baik tidak mampu mengurangi konflik agensi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Laporan keuangan perusahaan menjadi lebih kredibel di mata *stakeholder*, salah satunya kreditur. Kreditur memiliki kepercayaan yang lebih kepada perusahaan dan memberikan perusahaan pinjaman berbunga demi mengembangkan usaha perusahaan. Penelitian ini menangkap bahwa tingkat biaya utang ini merupakan respon dari ketersediaan pendanaan perusahaan melalui utang. Hashim & Amrah (2016) menemukan bahwa efektivitas Komite Audit tidak mampu mempengaruhi Biaya Utang. Keahlian Keuangan Komite Audit menjadi bagian dari indikator perhitungan efektivitas Komite Audit dalam penelitian tersebut

I. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Biaya Utang

H9 yang menyatakan bahwa *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Biaya Utang **ditolak**. Hasil yang didapatkan justru sebaliknya yaitu *Corporate Governance* mempengaruhi Biaya Utang secara **signifikan positif**. Dalam penelitian ini didapatkan bukti bahwa semakin efektif mekanisme pengawasan perusahaan mampu berdampak pada peningkatan biaya utang perusahaan. Kreditur memandang mekanisme pengawasan tersebut sebagai stimulus bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik. Selain itu, dapat meningkatkan kepercayaan kreditur bahwa perusahaan mampu memenuhi tanggung jawabnya meskipun tingkat pengembalian yang diharapkan kreditur lebih tinggi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa:

1. Ukuran Dewan Komisaris **berpengaruh positif** terhadap biaya utang
2. Frekuensi Pertemuan Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap biaya utang
3. Proporsi Komisaris Independen **berpengaruh positif** terhadap biaya utang
4. Keahlian Keuangan Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap biaya utang
5. Ukuran Komite Audit tidak berpengaruh terhadap biaya utang
6. Frekuensi Pertemuan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap biaya utang
7. Proporsi Komite Audit Independen tidak berpengaruh terhadap biaya utang
8. Keahlian Keuangan Komite Audit **berpengaruh positif** terhadap biaya utang
9. *Corporate Governance* **berpengaruh positif** terhadap biaya utang

DAFTAR PUSTAKA

Abor, J. 2007. Corporate governance and financing decisions of Ghanaian

- listed firms. *Journal of Corporate Governance*, Volume 7 No.1, hlm. 83–92.
- Adam, M., Mukhtaruddin, Soraya, N., & Yusrianti, H. 2015. Good Corporate Governance and Cost of Debt: Listed Companies on Indonesian institute for Corporate Governance. *Asian Social Science*, Volume 11 No. 25, hlm. 58–77.
- Anderson, R. C., Mansi, S. A., & Reeb, D. M. 2004. Board characteristics, accounting report integrity, and the cost of debt. *Journal of Accounting and Economics*, Volume 37 No.3, hlm. 315–342.
- Andriani, D. P., Syafitri, Y., & Sunreni, S. 2019. Pengaruh Good Corporate Governance dan Voluntary Disclosure terhadap Biaya Utang (Studi Empiris pada Perusahaan Go Public Peringkat 10 Besar yang Terdaftar di CGPI tahun 2012-2016). Diakses 28 Maret 2019 dari <https://doi.org/10.31227/osf.io/jxv6a>.
- Apergis, N. 2019. Financial Experts on the Board: Does It Matter for the Profitability and Risk of the U.K. Banking Industry? *Journal of Financial Research*, Volume 42 No.2, hlm. 243–270.
- Ashkhabi, I. R., & Agustina, L. 2015. Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan Perusahaan dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang. *Accounting Analysis Journal*, Volume 4 No. 3, diakses dari <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/aaaj>.
- Bhojraj, S., and Sengupta, P. 2003. Effect of Corporate Governance on Bond Ratings and Yields: The Role of Institutional Investors and Outside Directors. *Journal of Business*, Volume 76 No. 3, hlm. 455–475.
- Binus University. 2015. *Mengkaji Kelayakan Bisnis Menggunakan Cost of Capital*. Diakses 2 November 2015, dari <https://accounting.binus.ac.id/2015/11/02/mengkaji-kelayakan-bisnis-menggunakan-cost-of-capital/>
- CNBC Indonesia. 2019. Kisah Krakatau Steel: Rugi 7 Tahun Beruntun & Utang Segunung. Diakses 13 April 2019, dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190413081448-17-6646/kisah-krakatau-steel-rugi-7-tahun-beruntun-utang-segunung/2>.
- Deviacita, A. W. 2015. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Kemungkinan Financial Distress. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 4 No.3, hlm. 453–463.
- Ghouma, H., Ben-Nasr, H., & Yan, R. 2018. Corporate governance and cost of debt financing: Empirical evidence from Canada. *Quarterly Review of Economics and Finance*, Volume 67, hlm. 138–148.
- Hadi, V. W. 2015. Pengaruh Komisaris Independen, Frekuensi Rapat Dewan Komisaris, Reputasi Auditor, Kompleksitas, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan terhadap Keberadaan Risk Management Committee (RMC) pada Perusahaan Go Public di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Non Finansial Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013). *Jurnal Akuntansi Bisnis*, Volume 14 No. 27, hlm. 51-74.
- Hashim, H. A., & Amrah, M. 2016. Corporate governance mechanisms and cost of debt. *Managerial Auditing Journal*, Volume 31 No.3, hlm. 314–336.

- Juniarti, J., & Sentosa, A. A. 2009. Pengaruh Good Corporate Governance, Voluntary Disclosure terhadap Biaya Hutang (Costs of Debt). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Volumen 11 No. 2, hlm. 88.
- Katadata.com. 2018. Patgulipat SNP Finance yang Menyeret Sang Legenda Pembiayaan Retail. Diakses 27 September 2018, dari <https://katadata.co.id/telaah/2018/09/27/patgulipat-snp-finance-yang-menyeret-sang-legenda-pembiayaan-retail>.
- Katadata.com. 2018. Sri Mulyani Jelaskan Manfaat Kenaikan Utang Rp 1.329 T di Era Jokowi. Diakses 23 Oktober 2018 dari <https://katadata.co.id/berita/2018/10/23/sri-mulyani-jelaskan-manfaat-kenaikan-utang-rp-1329-t-di-era-jokowi>.
- Kholmi, M., Sumarji, S. A., & Zubaidah, S. 2019. Pengaruh Corporate Governance terhadap Kualitas Environmental Disclosure. *Equity: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Volume 22 No.1, hlm. 26-36.
- Li, L., Dong, F., Liu, Y., Huang, H., & Wang, S. 2016. The effect of corporate governance on debt financing cost of listed companies. *Journal of Systems Science and Complexity*, Volume 29 No. 3, hlm. 772–788.
- Lorca, C., Sánchez-Ballesta, J. P., & García-Meca, E. 2011. Board Effectiveness and Cost of Debt. *Journal of Business Ethics*, Volume 100 No. 4, hlm. 613–631.
- Magnanelli, B. S., & Izzo, M. F. 2017. Corporate social performance and cost of debt: The relationship. *Social Responsibility Journal*, Volume 13 No. 2, hlm. 250–265.
- Masri, I., & Martani, D. 2014. Tax avoidance behaviour towards the cost of debt. *International Journal Trade and Global Markets*, Volume 7 No. 3, hlm. 235-249.
- Meiriasari, V. 2017. Pengaruh Corporate Governance, Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan terhadap Biaya Utang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, Volume 8 No. 1, hlm. 28.
- Nugroho, D. R., & Meiranto, W. 2014. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Biaya Ekuitas Dan Biaya Utang. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Volume 3 No.3, hlm. 1–12.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Diakses 29 Desember 2015 dari <http://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/regulasi/lembaga-keuangan-mikro/peraturan-ojk/>
- Otoritas Jasa Keuangan. 2014. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik. Diakses 8 Desember 2014 dari. <http://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-tentang-Direksi-dan-Dewan-Komisaris-Emiten-atau-Perusahaan-Publik>
- Pinangkaan, G. 2012. Pengaruh Return On Investment (ROI) dan Economic Value Added (EVA) Terhadap Return Saham Perusahaan. *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, Volume 1 No.2, hlm. 99-111.
- Prastiti, A., D., & Meiranto, W. 2013. Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris

- dan Komite Audit terhadap Manajemen Laba. *Diponegoro Journal of Accounting*, Volume 2 No.4, hlm. 1-12.
- Piot, C., & Piera, F. M. 2009. Corporate Governance Reform and the Cost of Debt Financing of Listed French Companies. Diakses 1 September 2009 dari <https://ssrn.com/abstract=960681>.
- Rahmawati. 2015. Pengaruh Penghindaran Pajak dan Good Corporate Governance Terhadap Biaya Utang (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2013). *Jurnal Akuntansi Universitas Padang*, Volume 3 No.1, hlm. 1-33.
- Saputra, M., & Faizal, M. 2016. The Influence of Corporate Governance Perception Index, Managerial Ownership, Government Ownership and Sales Growth on Cost of Debt (Study in Non-Financial Companies Listed on IDX Year 2011-2014). *Journal of Research in Business, Economics and Management*. Volume 6 No.2, hlm. 845-857.
- Sarasmitha, C., Subroto, B., & Rahman, A. F. 2018. Dewan Komisaris dan Biaya Utang. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, Volume 14 No. 2, hlm. 88-100.
- Sarawana, S. & Destriana, N. 2015. Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Pendanaan Hutang Perusahaan, Deviden serta Ukuran Perusahaan Terhadap Kualitas Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Volume 17 No 2, hlm. 156-167.
- Sochib. 2016. Good Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan. Yogyakarta: Deepublish.
- Swissia, P. & Purba, B. 2018. Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Keluarga, Pengungkapan Sukarela dan Leverage terhadap Biaya Utang. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, Volume 9 No. 2, hlm. 42-65.
- Tiena, H. T. M. 2017. Pengaruh Atribut Dewan Komisaris terhadap Biaya Utang. Diakses 18 September 2017 dari <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/61574>
- Wardani, D. K., & Rumahorbo, H. D. S. 2018. Pengaruh Penghindaran Pajak, Tata Kelola Dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Biaya Hutang. *Jurnal Akuntansi*, Volume 6 No. 2, hlm. 180-193.
- Liputan6.com. 2018. Penerapan Tata Kelola Baik Perusahaan Indonesia Tertinggal di ASEAN. Diakses 10 Desember 2018 dari <https://m.liputan6.com/bisnis/read/3804198/penerapan-tata-kelola-baik-perusahaan-indonesia-tertinggal-di-asean>.
- Yunita, N. 2012. Pengaruh Corporate Governance Terhadap Voluntary Disclosure Dan Biaya Hutang. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, Volume 1 No.1, hlm. 90-96.